

## **BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO TAHUN 1998**

Penulis1 (Lilik Eka Aprilia), Penulis 2 (Drs. Kayan Swastika, M.si) (Drs. Sumarjono, M.Si)  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: lilikeka.aprilia@yahoo.com

### **Abstrak**

Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto adalah akhir dari organisasi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto 1966-1998. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang faktor berakhirnya Pemerintah Presiden Soeharto dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi diperparah oleh adanya virus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan kroni Presiden Soeharto. Krisis ekonomi yang terjadi kemudian berkembang menjadi krisis politik, krisis sosial dan krisis budaya keamanan yang semakin memanas dan memperluas permintaan agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden.

**Kata Kunci:** Presiden Soeharto, KKN

### *Abstract*

*The end of President Suharto's Government is the end of the current organization led by President Suharto from 1966 to 1998. The purpose of this research is to investigate and examine more deeply about the end of President Suharto's Government factor using the method of history. The results showed that the end of President Suharto's rule effected by the onset of the economic crisis compounded by the presence of the virus of corruption, collusion and nepotism (KKN) conducted by family and cronies of President Suharto. The economic crisis that happened later developed into a political crisis, a social crisis and a crisis of security culture that is increasingly heating up and expanding demand Soeharto down from his position as President.*

**Keywords:** *Presiden Soeharto, Crisis Ekonomi and Corruption, Collusion and Nepotism*

### **Pendahuluan**

Jenderal Soeharto membangun sebuah pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan masa Orde Baru untuk membedakan dengan masa pemerintahan Sukarno. Orde Baru merupakan suatu pemerintahan baru yang dibangun berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru sebagai suatu pemerintahan baru mewarisi kehancuran ekonomi, sosial dan politik. Pemerintahan Orde Baru harus bisa mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk keluar dari krisis, sebab apabila Orde Baru bisa mengatasi berbagai macam krisis dengan baik, pemerintahan Orde Baru akan semakin kuat dan diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Menurut Presiden Soeharto, untuk membangun ekonomi yang lebih maju diperlukan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun regional. Keamanan dalam negeri harus terjamin agar penanam modal asing yang diperlukan tidak terganggu. Presiden Soeharto mempercayakan pembangunan ekonomi kepada kaum teknokrat (Adam, 2009:46).

Presiden Soeharto menstabilkan keadaan politik ketika keadaan ekonomi sudah stabil, penataan dan penertiban politik ini diserahkan kepada militer. ABRI terpaksa maju kebidang politik karena ABRI adalah satu produk dari revolusi 45 yang masih utuh, yang wajib maju ke lapangan politik untuk menyelamatkan bangsa dan negara RI (Usman, Tanpa Tahun:69).

Pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan menjadi tolak ukur keberhasilan Soeharto, meskipun harus mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia

yang menjadi landasan politik pemerintahan presiden Soeharto. Masyarakat merasa kecewa atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Soeharto. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah bertambah saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini bermula dari Thailand pada awal Juli 1997, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah yang menunjukkan kecenderungan melemah. Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. Menurut IMF krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kegagalan pemerintahan Indonesia dalam merekonstruksi ekonomi. Indonesia banyak melakukan alternatif-alternatif untuk menstabilkan ekonomi namun usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia (Luhulima, 2006:78).

Kepercayaan rakyat mulai menurun melihat perekonomian yang dibangun Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun hancur. Harga-harga barang mulai naik, banyaknya hubungan kerja diputus sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan maraknya virus KKN di Indonesia. Hal ini membuat mahasiswa dan rakyat Indonesia mengadakan demonstrasi untuk meminta Soeharto mundur dari kursi kepresidenannya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Usaha demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan usaha menduduki gedung DPR/MPR tidak sia-sia. Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 tepat jam 09.00 WIB dengan memakai pakaian sipil warna gelap dan peci hitam yang didampingi wakil Presiden Bacharuddin Jusuf (B.J) Habibie dan para ajudannya, akhirnya membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto yang ditandai dengan pembacaan surat pengunduran diri tanggal 21 Mei 1998 merupakan kejadian yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena Presiden Soeharto adalah Presiden yang sangat lama dan kuat memimpin Indonesia selama 32 tahun, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang membuat Presiden Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mencari jawaban mengenai: 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998 ?; 2) Bagaimanakah proses berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998 ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menggunakan teori sistem dunia (*world system*). Teori sistem dunia digunakan untuk mengkaji berakhirnya pemerintahan presiden soeharto dilihat dari dinamika global.

## Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Penyebab Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain adalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan dan krisis sosial budaya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang bermula dari Thailand menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi menurun terhadap dollar AS. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengakibatkan mahalnya harga-harga bahan pokok di pasar, banyaknya PHK, meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Keadaan tersebut mendorong mahasiswa menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut presiden Soeharto. Penjelasan diatas akan dibahas lebih jelas di dalam sub bab di bawah ini.

#### a. Krisis Moneter di Indonesia Tahun 1997

Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500/US \$ terus mengalami kemerosotan hingga 9 persen. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menjadi perhatian khusus Presiden Soeharto. Meskipun demikian, Presiden masih

menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menahan krisis yang bermula dari Thailand tersebut. Merosotnya nilai mata uang rupiah yang pada bulan Oktober 1997 berada di posisi Rp4.000 /US \$, pada bulan Januari 1998 rupiah terus melemah hingga level sekitar Rp 17.000 US \$ (Poeponegoro dan Notosusanto, 2009:665). Krisis yang sangat hebat ini telah mengakibatkan naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, harga premium naik dua kali lipat, ribuan usaha bangkrut, meluasnya pengangguran, terjadinya PHK secara besar-besaran dan membengkaknya jumlah orang miskin baru. Untuk mengatasi krisis ekonomi ini seluruh sektor publik meluncurkan berbagai macam kebijakan seperti, Gerakan Cinta Rupiah (Gentar), Gerakan Nasional Cinta Indonesia (Genta), Gerakan Cinta Pasar Modal, Gerakan Cinta Reksa Dana dan kebijakan Menteri Keuangan Mar'ie Mohammad mencantumkan harga dalam denominasi rupiah sebagai dasar transaksi di wilayah Indonesia. (Sahdan, 2004:255-258).

Pemerintah RI mulai Oktober 1997 meminta bantuan IMF Karena tekanan US\$ terhadap Rupiah semakin menguat (Sahdan, 2004:259-260). Perjanjian pertama dengan IMF pada tanggal 30 Oktober 1997, ternyata perjanjian ini tidak mendapat hasil yang memuaskan. Keadaan krisis ekonomi bertambah parah. Presiden Soeharto terpaksa menuruti nasihat Bill Clinton di Washington, Helmut Kohl di Bonn, dan Hashimoto Ryutaro di Tokyo yang melakukan pembicaraan di telepon, serta mendapatkan kunjungan Goh Chok Tong dari Singapura, yang semuanya mendesak Soeharto untuk menerima proposal reformasi IMF. Tanggal 15 Januari, Soeharto tampaknya menuruti nasihat tersebut dengan menandatangani perjanjian IMF (Ricklefs, 2005:651). Nilai tukar rupiah yang terus menurun hingga mencapai Rp 17.000 per US\$ memaksa Presiden Soeharto menandatangani LoI untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 10 April 1998. Meskipun kesepakatan dengan IMF berjalan terus sebagai upaya pemulihan krisis, tetapi krisis terus berjalan sehingga menghancurkan sendi-sendi perekonomian

nasional yang sudah dibangun selama 30 tahun (Sahdan, 2004:269).

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk merupakan kegagalan IMF di Indonesia yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Kebijakan IMF di Indonesia mulai Oktober 1997 hingga turunnya Soeharto menunjukkan kegagalan institusi ini menangani krisis ekonomi. Kegagalan IMF sebenarnya bukan saja karena memberikan diagnosa dan resep yang salah terhadap krisis ekonomi Indonesia bukan juga kesalahan dalam membaca peta sosial politik Indonesia tapi IMF menginginkan adanya pergantian kepemimpinan di Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan malapetaka bagi kekuasaan Soeharto, karena adanya krisis ekonomi Soeharto kehilangan sumber potensial untuk memperkuat legitimasi bagi kekuasaannya karena pemerintahan Soeharto selama berkuasa hanya mengandalkan legitimasi kinerja ekonomi bukan legitimasi moral dan prosedural, maka krisis ekonomi merupakan pemicu utama menurunnya legitimasi Soeharto. Paradigma *trickle down effect* atau efek menetas ke bawah untuk pemerataan ekonomi merupakan formula andalan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi nasional ternyata amat rentan dan tidak kokoh. Paradigma tersebut tidak dapat dinikmati oleh rakyat banyak "kue pembangunan nasional" lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, terutama orang yang memegang akses ekonomi dan politik di tingkat nasional, ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonom cukup besar sehingga rakyat kecewa terhadap pemerintahan presiden Soeharto (Urbaningrum, 1999:42). Soeharto kehilangan kepercayaan dari rakyat sehingga terjadi protes sosial yang meluas. Rakyat menuntut agar Soeharto segera turun dari jabatannya. Gerakan sektor massa yang massif dan berskala besar ini menimbulkan kepanikan di tingkat elite yang dekat dengan Soeharto sehingga mereka lari meninggalkan Soeharto sendiri menghadapi massa yang semakin besar. Protes sosial yang meluas merupakan ungkapan kekecewaan massa terhadap berbagai kebijakan

dan tindakan politik yang dibangun Soeharto selama berkuasa yang selalu menghalau dan menyingkirkan massa (Sahdan, 2004:244).

#### **b. Situasi dan Kondisi Sosial Politik Indonesia**

Presiden Soeharto menstabilkan keadaan politik Indonesia bekerjasama dengan tiga pilar utamanya yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar. Kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan ketiga pilarnya ini dapat menyelesaikan berbagai masalah politik serta ekonomi yang diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. Soeharto memasukkan ABRI ke dalam ranah politik karena menurut Soeharto ABRI dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan Pancasila UUD 1945 dari perubahan yang dilakukan oleh MPR/DPR RI, setelah mampu mengatasi krisis pemerintah Soeharto melakukan fusi (penggabungan) partai-partai politik pada tahun 1973 yang sangat dipaksakan untuk menyingkirkan seluruh pesaing bagi partai pemerintah yaitu partai Golkar (Ricklefs, 2005:594). Soeharto beranggapan bahwa partai-partai politik merupakan sumber konflik dan ketidakstabilan politik seperti yang pernah dialami oleh pemerintah sebelumnya, sehingga Soeharto memutuskan untuk melakukan fusi partai politik (Izzah, 1995:18). Dari 10 partai politik di fusi menjadi 3 partai politik yaitu PPP yang didominasi oleh golongan yang berideologi Islam dan Partai Demokrasi Indonesia umumnya beranggotakan golongan nasionalis dan Kristen dan partai politik pemerintah (Golkar) (Moedjanto, 1988:155).

Proses politik pada masa Soeharto tidak transparan pola kaderisasi masih bersifat nepotisme, hingga tidak menjamin jenjang karir yang jelas bagi aktivis politik. Transparansi proses pengambilan keputusan sangat tidak jelas, segala hal dapat berlangsung secara mendadak sesuai keinginan pemerintah. Penyimpangan masa Orde Baru terlihat juga pada tindakan Soeharto dalam memerintah bangsa Indonesia. Demokratisasi di Indonesia pada masa Orde Baru masih belum terlaksana secara utuh. Dilihat dalam tatanan pemerintah pelaksanaan demokrasi pancasila belum berjalan dengan murni. Pemusatan kekuasaan itu meliputi bidang politik, ekonomi, hukum,

sosial dan budaya. Pada bidang politik pemerintah memegang kendali kekuasaan atas lembaga legislatif (MPR/DPR), ABRI, dan partai politik utamanya Golkar. Di bidang ekonomi kekuasaan pemerintah terlihat pada monopoli usaha keluarga dan kroni Presiden Soeharto selain itu, di bidang hukum pemerintah juga mengendalikan kekuasaan kehakiman termasuk kekuasaan yudikatif, kemudian di bidang sosial, kekuasaan yang terpusat ditunjukkan oleh adanya pola patron-klien dalam organisasi kemasyarakatan. Sedangkan di bidang budaya terlihat dari kebiasaan untuk memperoleh arahan dari atas dan feodalisme (Salim dalam Gautama dan Boediono, 1998:34). Di bidang bisnis, Presiden memilih Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kebijakan yang penting dari BUMN tersebut juga menunggu persetujuan Presiden (Adam, 2009:50).

Masyarakat merasa pemerintah Orde Baru mengabaikan demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat, tidak ada pembelaan hak asasi manusia. Pers tidak dapat bergerak bebas karena dicekal oleh Presiden Soeharto apabila mencoba mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru. Buku-buku dilarang beredar jika tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Banyak pengarang dan penerbit buku menjadi korban atas tindakan pemerintah melalui Jaksa Agung. Tindakan ini menghalang munculnya para pengarang yang kreatif dan jenius. Buku terakhir yang dilarang adalah *Era Baru Pemimpin Baru, Badio Menolak Rekayasa Orde Baru*, buah karya mantan pimpinan PSI (Radjab, 1999:17). Pemerintah memberikan ruang gerak yang sangat terbatas bagi masyarakat. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru karena sistem pemerintahannya yang bersifat sentralistis. Semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di atur secara sentral dari pusat pemerintah, sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik bidang sosial, ekonomi dan politik nasional (Gaffar, 2000:35).

Pemerintahan Soeharto mempunyai salah satu ciri politik yang khas yaitu meluasnya KKN. Soeharto dengan leluasa

memanfaatkan hasil-hasil pertumbuhan dan pembangunan (Sahdan, 2004:147). Soeharto dengan menggunakan konsep “kekeluargaan yang harmonis” memanfaatkan Pancasila untuk berbagai kepentingan pribadinya memperlancar bisnis milik keluarga dan kroninya (Winters, 1999:18).

Maraknya praktek KKN dalam tubuh birokrasi, lembaga-lembaga negara dan perusahaan negara yang dilakukan oleh kroni dan keluarga Soeharto menambah tingkat kesenjangan sosial semakin meningkat dalam masyarakat. Kesenjangan ini terjadi karena fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pengusaha rakyat biasa tidak sama dengan fasilitas yang diberikan kepada kroni dan keluarganya sehingga menyebabkan kecemburuan sosial (Urbaningrum, 1999:4).

Mahasiswa sangat prihatin saat melihat ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan protes secara radikal terhadap pemerintahan Orde Baru. Penyampaian protes ini dilakukan dengan cara demonstrasi. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa ini berlangsung di berbagai kota seluruh Indonesia (Sanit, 1999:173).

### c. Situasi Kondisi Keamanan di Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 menyebabkan terjadinya pergolakan dalam tatanan politik dan keamanan bangsa Indonesia, akibatnya timbul tekanan dari rakyat agar dilakukan pergantian kepemimpinan nasional untuk menangani krisis ekonomi dan memperbaiki perpolitikan bangsa Indonesia. Keresahan dalam mempertahankan hidup menjadi kerusuhan massal di berbagai tempat. Rakyat mengamuk di Ibukota mengambil barang-barang apa saja yang bisa mereka bawa untuk mempertahankan hidup. Para pelaku kriminalitas melakukan pembakaran semau mereka. Sasaran utama para pelaku kriminalitas adalah etnis Cina yang selama ini lebih menguasai perekonomian Indonesia. Militer tidak dapat berbuat banyak saat massa menjarah toko-toko milik orang Cina. Pasukan keamanan yang diminta untuk mengamankan pusat distribusi Indofood

Jakarta malah membantu massa menjarah barang-barang (Anderson, 1998:22-24). Intensitas konflik yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang banyak melakukan penyimpangan politik. Proses demokratisasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Demokrasi yang menjadi landasan politik negara Indonesia masih belum terlaksana secara utuh (Rais, 1998:12).

Keamanan Indonesia seringkali mendapat sorotan dari dunia internasional yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Contoh kasus yang ramai diperbincangkan hingga sampai ke luar negeri adalah kasus Marsinah yang terjadi pada bulan Mei 1993 Marsinah seorang aktivis buruh wanita yang diculik kemudian diperkosa secara brutal dan disiksa hingga tewas (Ricklefs, 2005:640). Bahkan, Soeharto mendapatkan peringatan langsung dari negara-negara barat mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Dili pada tanggal 12 November 1991. Dimana ABRI tampak menembaki puluhan warga sipil Timor-Timur di pemakaman Santa Cruz. Akibat kejadian ini banyak korban yang berjatuh ada 19 orang terbunuh dan 50 orang mengalami luka-luka (Forrester, 2002:160-162).

Keadaan keamanan di Indonesia semakin memanas ketika aparat keamanan pada tahun 1996 menunjukkan sikap arogannya dalam menangani lawan politik yaitu peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI Megawati pada tanggal 27 Juli 1996 oleh aparat, hal ini disebabkan sikap Megawati yang secara terbuka berani mengkritisi kinerja pemerintah yang akhirnya Megawati mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Peristiwa penyerbuan kantor DPP-PDI Megawati berubah menjadi kerusuhan massal di Jakarta (Winters, 1999:38).

### d. Situasi Kondisi Sosial Budaya

Persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat menjalar ke krisis sosial budaya. Krisis yang terjadi di Indonesia menghancurkan seluruh sektor korporasi, seperti perbankan dan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menghilangkan

penghasilan dari sebagian besar warga negara yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara besar-besaran. Pemicu utamanya adalah naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok dan laju inflasi.

Keadaan sosial budaya di Indonesia pada saat menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto sangat kacau hal ini didorong oleh krisis politik dan krisis ekonomi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat dan masyarakat mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis. Pertikaian yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis. Intensitas konflik yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang banyak melakukan penyimpangan politik. Proses demokratisasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Demokrasi yang menjadi landasan politik negara Indonesia masih belum terlaksana secara utuh (Rais, 1998:12). Bulan Oktober 1996, lima orang tewas ketika umat Islam di Situbondo, Jawa Timur membakar 9 gereja Kristen. Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan Desember, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan harta benda milik orang Cina dihancurkan. Akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997 muncul laporan-laporan dari Kalimantan Barat bahwa suku Dayak dan Melayu setempat sedang membunuh kaum pendatang Madura. Beberapa sumber melaporkan lebih dari seribu orang tewas atas kejadian itu, dan suku Dayak terus melakukan praktik memenggal kepala korban mereka (Ricklefs, 2005:645).

## **2. Proses Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998**

Pemerintahan presiden Soeharto melakukan berbagai penyimpangan sehingga membuat rakyat merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebencian rakyat tidak dapat dipendam lagi sehingga

semakin hari sikap anti pemerintah terus bermunculan. Ditambah lagi dengan aksi-aksi mahasiswa yang menuntut presiden Soeharto turun dan segera melaksanakan reformasi. Para tokoh politis, tokoh masyarakat dan mahasiswa semakin berani berkonfrontasi dengan Presiden Soeharto dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru.

### **a. Gerakan Mahasiswa Tahun 1998**

Pelaku gerakan mahasiswa dari kalangan intern kampus mulai menonjol pada akhir Februari 1998. Faktor pendorong bagi kalangan organisasi intern mahasiswa dan *civitas academica* yang selama ini pasif melawan pemerintah adalah keresahan masyarakat akibat melangitnya harga-harga sembako dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram di kalangan mayoritas mahasiswa (Sumitro, Tanpa Tahun:9).

Demonstrasi mahasiswa yang dilakukan pada sebelum dan sesudah SU MPR membawa beberapa tuntutan yaitu pertama, harga sembako lebih rendah sebab, harga kebutuhan pokok menanjak naik sejak Juli 1997, kedua, mahasiswa juga menuntut agar MPR tidak mempertahankan Soeharto yang menjadi Presiden sebanyak tujuh kali berturut-turut, ketiga, mahasiswa menuntut reformasi politik dan ekonomi setelah MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan BJ. Habibie sebagai wakil presiden (Forrester, 2002:174).

Mahasiswa tidak semata-mata bergerak sendiri dalam menyuarkan reformasi, melainkan memperoleh dukungan yang kuat dari elemen-elemen kelas menengah. Para rektor, dekan dan dosen yang sebelumnya harus tunduk pada birokratis kampus di berbagai perguruan tinggi ramai-ramai mendukung suara reformasi mahasiswa. Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais juga mendukung gerakan mahasiswa untuk menuntut diadakannya reformasi (Sahdan, 2004:246).

Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Februari 1998 memuncak pada tanggal 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh

aparatus kepolisian (Zon, 2004:39). Tanggal 13-15 Mei 1998 diadakan aksi keprihatinan dan berkabung atas gugurnya mahasiswa Trisakti. Kerusuhan yang terjadi tanggal 13-15 Mei 1998 menyebabkan lebih dari seribu orang tewas di Jakarta. Ratusan orang tewas ketika mereka berusaha menjarah ratusan pusat-pusat pembelanjaan.

Keadaan Tanah Air yang tidak menentu menyebabkan Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Kairo, yang dijadwalkan pulang pada tanggal 16 Mei 1998, namun Presiden memutuskan untuk pulang pada tanggal 15 Mei 1998. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan para pembantu-pembantunya di kediamannya di Jalan Cendana untuk meminta laporan kondisi terakhir di dalam negeri. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM pada keesokan harinya. Presiden juga berjanji akan melakukan reformasi di segala bidang dan segera *mereshuffle* Kabinet Pembangunan VII yang dipimpinnya. Langkah-langkah kebijakan ini tidak mampu meredakan situasi yang terjadi pada saat itu. Tanggal 18 Mei gerakan mahasiswa memutuskan untuk menduduki Gedung DPR/MPR (Notosusanto, 2009:670).

#### **b. Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR**

Peristiwa penembakan empat mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998 yang kemudian diikuti dengan kerusuhan besar di ibukota Jakarta dari 13-15 Mei mencapai puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998 saat mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Ketika massa di luar gedung melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan, di dalam gedung DPR pimpinan DPR dan fraksi-fraksi mengadakan rapat dengan mahasiswa yang diwakili oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jabotabek (FKSMJ) untuk membahas situasi bangsa (Soemardjan, 1999:175). Keputusan tersebut diambil mengingat keadaan bangsa Indonesia semakin tidak terkendali dan sangat membahayakan kesatuan bangsa. Siangnya masyarakat tiba-tiba dikejutkan dengan pernyataan Harmoko yang sebelumnya sangat dikenal sebagai pengikut setia Soeharto menyerukan kepada Presiden agar mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa (Anderson, 1999:41).

Pukul 15.20 WIB, ketua DPR RI Harmoko yang didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metaareum (F-PP), Abdul Gafur (F-KP), Fatimah Achmad (F-PDI), dan Syarwan Hamid (F-ABRI), menyatakan bahwa sebaiknya presiden Soeharto lebih baik mengundurkan diri.

Keesokan hari tanggal 19 Mei 1998 pukul 09.00 di Gedung MPR/DPR diselenggarakan Rapat Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas soal permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto untuk mundur yang dikemukakan Ketua DPR Harmoko. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini akhirnya pimpinan fraksi-fraksi mendukung permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri secara hormat dan dilaksanakan secara konstitusional (Luhulima, 2006:153).

Harmoko dan pimpinan MPR kembali meminta Soeharto untuk mundur pada tanggal 20 Mei. Presiden Soeharto menolak mundur dari jabatannya sehingga Harmoko memberi ultimatum kepada Soeharto, mundur pada hari jum'at (22/5) atau menghadapi sidang istimewa pada hari Senin (25/5). Soeharto akhirnya mau menyerah setelah menerima jaminan bahwa keluarga dan hartanya akan dilindungi.

#### **c. Soeharto ditinggalkan Kroninya**

Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan pembantu-pembantunya di Kabinet. Tanggal 20 Mei Harmoko dan anggota-anggota Golkar yang dulu loyal pada Soeharto mengancam Presiden untuk diminta pertanggung jawabannya melalui sidang istimewa MPR. Dua Mantan wakil Presiden Soeharto Letjen Sudharmono dan Jenderal Try Soetrisno juga meninggalkan mantan bosnya. Soeharto tidak lagi mampu membujuk siapa pun untuk bergabung dalam pemerintahannya atau komite reformasi yang diusulkannya. Basis kekuatan Soeharto yang sudah berantakan itu memicu keengganan pihak militer untuk membantu Presiden (Anderson, 1999:68). Pada saat itu pula dukungan internasional kepada Soeharto untuk bertahan juga sudah sirna. Menlu Amerika Serikat

Madelaine Albright sebelum tengah malam menyiarkan pernyataan melalui jaringan televisi *CNN* agar Soeharto mundur demi kepentingan transisi menuju demokrasi (Notosusanto, 2009:673). Menteri Luar negeri melakukan hal tersebut karena menyesal dan kecewa terhadap kejadian Trisakti 12 Mei 1998. Menteri pertahanan menyerukan agar semua kerjasama militer AS dengan ABRI dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan (Zon, 2004:91).

Soeharto tambah tergoncang saat para menterinya yang dipimpin oleh Akbar Tanjung dan Ginandjar Kartasasmita, mengadakan rapat dan menyusun pernyataan bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak Presiden untuk turun (Notosusanto, 2009:672).

Soeharto memerintah Mensesneg Saadillah Mursjid untuk segera mempersiapkan proses pengunduran dirinya sebagai Presiden secara konstitusional. Soeharto juga memerintahkan agar pengunduran dirinya dilakukan di istana Merdeka. Massa bersorak gembira saat mendengar bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya yang kemudian dilanjutkan pelantikan dan pengambilan sumpah B.J. Habibie untuk jabatan Presiden RI di hadapan para pejabat negara. Setelah Soeharto usai membacakan surat pengunduran dirinya secara langsung dilakukan upacara sumpah pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden RI.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi sumber yang peneliti lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto karena dilatarbelakangi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial budaya dan keamanan Indonesia yang semakin tidak menentu. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan turunnya nilai tukar mata rupiah terhadap dollar hingga menyebabkan naiknya kebutuhan sehari-hari, banyak terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi lebih agresif dan mudah marah sehingga banyak terjadi tindak kriminalitas. Selain itu yang membuat masyarakat marah adalah kelakuan

pemerintah yang banyak melakukan peyimpangan, hal ini membuat mahasiswa mengadakan demonstrasi menuntut presiden Soeharto untuk segera mengundurkan diri. Melihat keadaan Indonesia yang semakin lama semakin tidak menentu akhirnya presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang langsung digantikan oleh B.J Habibie.

### Saran

1. Bagi pembaca, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga, penulis mengharapkan para pembaca agar memberikan masukan terhadap hasil penulisan skripsi ini agar menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang lebih baik dan lebih maksimal;
2. Bagi mahasiswa calon guru, diharapkan dapat dijadikan sumber belajar yang memberikan keterangan lengkap mengenai Sejarah Nasional Indonesia khususnya Pemerintahan Soeharto;
3. Bagi Masyarakat umum, karya ini diharapkan dapat memberikan pelajaran yang berarti agar tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto;
4. Bagi FKIP Universitas Jember, karya ini diharapkan dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.

### Daftar Bacaan

- Adam, A. W. 2009. *Membongkar manipulasi Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- Anderson, B. dkk. *Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri*. Terjemahan oleh Farid Wahdiyono. 1998. Yogyakarta : LKiS.
- Forrester, G. 2002. *The Fall of Soeharto*. Australia: C. Hurst & Co Ltd ISBN.
- Gaffar, A. 2000. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gautama, S & Boediono, A. 1999. *Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih Menurut Empat Tokoh Reformasi : Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, dan Yusril Ihza Mahendra*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Izzah, L. 1995. "Pemerintah Indonesia awal Orde Baru". Tidak diterbitkan. Laporan penelitian. Jember: Universitas Jember.

Luhulima. 2006. *Hari-Hari Terpanjang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. Jakarta.

Moedjanto G. 1988. *Indonesia abad ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Poesponegoro, M. D. & Notosusanto. N. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Radjab, S. A. 1999. *Praktik Culus Bisnis Gaya Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Rais, M. A. 1998. *Suksesi & Keajaiban Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT Ikrar Mandiri Abadi.

Sahdan, G. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi*. Bantul: Pondok Edukasi.

Sanit, A. 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*. Yogyakarta: INSIST press.

Soemardjan, S. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Urbaningrum, A. 1999. *Ranjau-Ranjau Reformasi "Potret Konflik Pasca Kejatuhan Soeharto"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, S. (TanpaTahun). *Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Suharto?*. Jakarta: C.V Djakarta.

Winters, J. A. 1999. *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Jakarta : Djambatan.

Zon, F. 2004. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: Institute for Policy Studies.